



**PERATURAN BUPATI KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR 45 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBK (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) pada tanggal Lima Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
18. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji Dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

26. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 101);
27. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2020 Nomor 120).

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES
DAN
BUPATI GAYO LUES**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

APBK terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

APBK Gayo Lues Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp.815.258.197.291 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp.815.258.197.291	
b. Belanja Daerah	<u>Rp.813.258.197.291</u>	
Defisit/Surplus		Rp.2.000.000.000
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan	Rp.0,00	
2. Pengeluaran	Rp.2.000.000.000	
Pembiayaan Netto		Rp.(2.000.000.000)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp.815.258.197.291 (*delapan ratus lima belas juta milyar duar ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.50.000.000.000 (*lima puluh milyar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.294.400.000 (*empat milyar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.013.645.000 (*satu milyar tiga belas juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.563.729.067 (*empat milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu enam puluh tujuh rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.40.128.225.933 (*empat puluh milyar seratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah*).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.765.258.197.291 (*tujuh ratus enam puluh lima milyar dua ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah;
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 645.139.022.000 (*enam ratus empat puluh lima milyar seratus tiga puluh sembilan juta dua puluh dua ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 120.119.175.291 (*seratus dua puluh milyar seratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah*).

Pasal 6

- a. Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2022 adalah Nol dikarenakan Dana Hibah BOS sudah masuk pada DAK Non Fisik pada Pendapatan Transfer.

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.813.258.197.291 (*delapan ratus tiga belas milyar dua ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer;

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 542.032.983.911 (*lima ratus empat puluh dua milyar tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus sebelas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 268.288.450.074 (*dua ratus enam puluh delapan milyar dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu tujuh puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 232.612.893.764 (*dua ratus tiga puluh dua milyar enam ratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.30.980.014.229 (*tiga puluh milyar sembilan ratus delapan puluh juta empat belas ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.10.151.625.844 (*sepuluh milyar seratus lima puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.101.086.081.862 (*seratus satu milyar delapan puluh enam juta delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan; dan
 - e. Belanja aset tetap lainnya;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.19.738.181 (*sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.18.359.400.164 (*delapan belas milyar tiga ratus lima puluh sembilan empat ratus ribu seratus enam puluh empat rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.34.167.808.957 (*tiga puluh empat milyar seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah*).

- (5) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.48.163.388.940 (*empat puluh delapan milyar seratus enam puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan sembilan ratus empat puluh rupiah*).
- (6) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.375.745.620 (*tiga ratus tujuh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh rupiah*).
- (7) Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.25.578.102.818 (*dua puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah*), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.144.561.028.700 (*seratus empat puluh empat milyar lima ratus enam puluh satu juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.427.440.000 (*empat ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.144.133.588.700 (*seratus empat puluh empat milyar seratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah*).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000 (*dua milyar rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).

- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00(*Nol Rupiah*).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00(*Nol Rupiah*).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00(*Nol Rupiah*).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00(*Nol Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000 (*dua milyar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah;
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00(*Nol Rupiah*).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000 (*dua milyar rupiah*).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00(*Nol Rupiah*).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00(*Nol Rupiah*).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00(*Nol Rupiah*).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.2.000.000.000 (*dua milyar rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.(2.000.000.000) (*minus dua milyar rupiah*).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, maka dengan peraturan kepala daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Gayo Lues tahun anggaran 2022.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Gayo Lues ini terdiri dari:

Lampiran I	Ringkasan Penjabaran APBK yang diklasifikasi menurut akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
Lampiran II	Penjabaran APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
Lampiran III	Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
Lampiran IV	Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
Lampiran V	Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
Lampiran VI	Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
Lampiran VII	Rincian dana otonomi khusus menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Lampiran VIII	Rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan dbh minyak dan gas bumi*) menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Lampiran IX	Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Lampiran X	Sinkronisasi Kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan rancangan Qanun tentang APBK dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBK dengan program prioritas perbatasan negara;

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Blangkejeren

Pada Tanggal, 31 Desember 2021 M
27 Rabiul Akhir 1443 H

 **BUPATI GAYO LUES**
[Handwritten signature]
H. MUHAMMAD AMRU *win*

Diundangkan di Blangkejeren

Pada Tanggal, 31 Desember 2021 M
27 Rabiul Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GAYO LUES,

 **SETDA**
[Handwritten signature]
H. RASYIDIN PORANG

BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2021 NOMOR 622

KABUPATEN GAYO LUES
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.000.000.000
4.1.01	Pajak Daerah	4.294.400.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	50.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	50.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	50.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	644.126.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	644.126.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	644.126.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	80.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	80.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	80.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	1.574.674.000
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.574.674.000
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.574.674.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	10.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	10.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	10.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.020.200.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.020.200.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.020.200.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	785.400.000
4.1.01.15.01	PBBP2	785.400.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	785.400.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	130.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	130.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	130.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	1.013.645.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	302.220.000
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	100.000.000
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	100.000.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	150.000.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	150.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	20.600.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	20.600.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	31.620.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	31.620.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	561.425.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	337.325.000
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	30.825.000
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	110.000.000
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	155.000.000
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	41.500.000
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	150.000.000
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	150.000.000

KABUPATEN GAYO LUES
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	51.400.000
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	22.400.000
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	29.000.000
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	11.700.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	11.700.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	11.000.000
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	11.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	150.000.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	150.000.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	150.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.563.729.067
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	38.437.500
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	38.437.500
4.1.03.01.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	38.437.500
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	4.525.291.567
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.525.291.567
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.525.291.567
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	40.128.225.933
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	19.175.000
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	19.175.000
4.1.04.01.02.0008	Hasil Penjualan Alat Laboratorium	19.175.000
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	482.000.000
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	20.000.000
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	20.000.000
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	462.000.000
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	462.000.000
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	3.670.651.089
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	3.670.651.089
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	3.670.651.089
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	27.465.274.000
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	27.465.274.000
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	27.465.274.000
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	5.147.800.000
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	5.147.800.000
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	5.147.800.000
4.1.04.22	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	3.343.325.844
4.1.04.22.01	Pendapatan Zakat	3.343.325.844
4.1.04.22.01.0001	Pendapatan Zakat	2.238.325.844
4.1.04.22.01.0002	Pendapatan Infaq	1.100.000.000
4.1.04.22.01.0003	Pendapatan Shadaqah	5.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	765.258.197.291
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	645.139.022.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	538.993.541.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	10.459.669.000

KABUPATEN GAYO LUES
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.702.463.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	2.532.877.000
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	525.790.000
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	16.265.000
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	701.109.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	62.339.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.918.826.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	420.433.218.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	420.433.218.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	52.297.771.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	223.293.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.633.387.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4.390.969.000
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	200.000.000
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	2.926.589.000
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	6.784.121.000
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	5.223.650.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.694.817.000
4.2.01.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	735.160.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	9.124.858.000
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	7.263.574.000
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	4.829.257.000
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	6.603.433.000
4.2.01.01.03.0056	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	664.663.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	55.802.883.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	14.777.200.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	17.495.923.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.668.000.000
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.971.971.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.608.600.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	225.300.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	14.080.657.000
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	234.902.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.082.535.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	369.695.000
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	288.100.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	5.101.181.000
4.2.01.02.01	DID	5.101.181.000
4.2.01.02.01.0001	DID	5.101.181.000
4.2.01.05	Dana Desa	101.044.300.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	101.044.300.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	101.044.300.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	120.119.175.291
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	19.427.275.719
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	19.427.275.719

KABUPATEN GAYO LUES
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5.311.993.753
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.963.855.093
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	9.135.179.303
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	16.247.570
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	100.691.899.572
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	100.691.899.572
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	100.691.899.572
	Jumlah Pendapatan	815.258.197.291
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	542.032.983.911
5.1.01	Belanja Pegawai	268.288.450.074
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	225.285.918.208
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	173.445.791.634
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	173.321.198.634
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	124.593.000
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	13.495.352.852
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	13.489.538.512
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.814.340
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.496.236.464
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.496.236.464
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	6.791.896.680
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	6.791.896.680
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.753.619.052
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.745.849.052
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	7.770.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	9.126.475.648
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	9.120.392.368
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6.083.280
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	318.259.574
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	318.259.574
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	11.675.281
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	11.672.075
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.206
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	10.143.374.180
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	10.096.332.850
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	47.041.330
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	292.733.655
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	292.434.615
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	299.040
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	885.503.188
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	884.606.110
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	897.078
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus	525.000.000
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus	525.000.000

KABUPATEN GAYO LUES
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	0
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	0
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	31.182.499.015
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	263.408.287
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	1.000.000
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	47.000.000
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	600.000
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	23.000.000
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	250.000
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	152.000.000
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	36.558.287
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	3.000.000
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	17.495.923.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	17.495.923.000
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.971.971.000
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	1.971.971.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.668.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.668.000.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	81.256.728
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	81.256.728
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	8.810.890.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.342.320.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	462.570.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	6.000.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	891.050.000
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	564.650.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	326.400.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.312.180.950
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	451.290.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	451.290.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	48.421.800
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	48.421.800
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	62.257.020
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	62.257.020
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	254.110.262
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	254.110.262
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.940.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.940.000.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	199.835.118
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	199.835.118
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.096.100.000
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	67.200.000
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	21.600.000

KABUPATEN GAYO LUES
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	27.000.000
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1.980.300.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.605.796.250
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.605.796.250
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	178.887.116
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	56.053.512
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	56.053.512
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.232.400
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.232.400
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.274.589
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.274.589
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	494.544
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	494.544
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	431
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	431
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.557.376
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.557.376
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	134.316
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	134.316
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	402.948
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	402.948
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	700.564.785
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	498.964.785
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	498.964.785
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	128.400.000
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	128.400.000
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	128.400.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	500.000.000
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	500.000.000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	500.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.612.893.764
5.1.02.01	Belanja Barang	60.588.842.961
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	60.579.951.961
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	531.500.000
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.444.483.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.026.332.055
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	11.204.300.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	7.930.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.305.433.550
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.798.217.600
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	477.781.200
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	56.550.000

KABUPATEN GAYO LUES
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.681.712.303
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.627.384.222
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	156.060.945
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	381.844.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	944.206.300
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	277.135.400
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	406.370.450
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	370.095.000
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	191.200.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	104.403.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.775.701.910
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.069.544.526
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	8.604.412.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	234.000.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	14.827.764.000
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	428.420.000
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	1.000.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	926.534.500
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	881.655.000
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	26.408.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.012.931.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	276.102.000
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	82.528.000
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	1.720.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	315.500.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	106.600.000
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	17.192.000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	8.891.000
5.1.02.01.02.0009	Belanja Pipa-Pipa Baja	670.000
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	8.221.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	105.197.304.735
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	92.375.737.569
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	66.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.984.450.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.434.490.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	565.900.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	437.275.000
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	73.000.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	25.000.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.060.140.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	9.830.086.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	23.020.377.668
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.930.650.000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	763.300.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	61.250.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	146.500.000

KABUPATEN GAYO LUES
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	122.400.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	12.500.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	180.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	9.710.000.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.430.500.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	247.940.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.601.350.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.304.356.400
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.262.000.000
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	33.600.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.590.300.000
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	400.768.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	367.776.000
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	914.400.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	221.300.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	779.475.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	5.412.825.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	24.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.035.250.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	145.200.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	759.600.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	11.600.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	503.217.540
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.760.231.361
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	419.175.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	668.242.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	23.052.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	336.260.600
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	4.620.000.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	80.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.110.795.000
5.1.02.02.04.0027	Belanja Sewa Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	3.000.000
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	183.900.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	52.645.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	66.000.000
5.1.02.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	535.000.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	56.500.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	102.000.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	109.300.000
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	2.450.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	779.650.000
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	446.650.000
5.1.02.02.05.0014	Belanja Sewa Bangunan Gedung Garasi/Pool	20.000.000
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	60.000.000
5.1.02.02.05.0038	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I	78.000.000
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	175.000.000

KABUPATEN GAYO LUES
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.934.316.992
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	1.268.859.123
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	188.000.000
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	250.000.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	442.000.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	320.585.300
5.1.02.02.08.0026	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	100.800.000
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	2.364.072.569
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	660.065.174
5.1.02.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	590.065.174
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	70.000.000
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	6.000.000
5.1.02.02.10.0017	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kesehatan	6.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.330.740.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	5.182.246.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	113.494.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	35.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	10.821.539.800
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.946.946.800
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	31.660.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.652.552.800
5.1.02.03.02.0104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak	90.030.000
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	35.000.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	217.004.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.830.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	800.000.000
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	0
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	118.870.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.021.951.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.699.351.000
5.1.02.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	34.500.000
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	260.000.000
5.1.02.03.03.0042	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	28.100.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.852.642.000
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	3.052.642.000
5.1.02.03.04.0094	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)	800.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	12.645.912.268
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.580.519.100
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.738.189.100
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	841.330.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.000.000
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	65.393.168
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	65.393.168
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.618.820.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.399.970.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	529.520.000

KABUPATEN GAYO LUES
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	870.450.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	218.850.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	116.400.000
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	102.450.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	14.775.200.000
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	14.775.200.000
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	14.775.200.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	26.965.274.000
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	26.965.274.000
5.1.02.99.99.99999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	26.965.274.000
5.1.05	Belanja Hibah	30.980.014.229
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.050.000.000
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.050.000.000
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.050.000.000
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	70.000.000
5.1.05.02.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	70.000.000
5.1.05.02.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	70.000.000
5.1.05.04	Belanja Hibah kepada BUMD	6.635.669.000
5.1.05.04.02	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	6.635.669.000
5.1.05.04.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	6.635.669.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	22.724.345.229
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	14.774.215.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	9.790.000.000
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.984.215.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.233.900.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	625.300.000
5.1.05.05.02.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.608.600.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.716.230.229
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	500.000.229
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.216.230.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	500.000.000
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	500.000.000
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	500.000.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	10.151.625.844
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	5.817.625.844
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	5.567.625.844
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	5.567.625.844
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	250.000.000
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	250.000.000
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	426.000.000
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	426.000.000
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	426.000.000

KABUPATEN GAYO LUES
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	3.908.000.000
5.1.06.04.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	3.908.000.000
5.1.06.04.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	3.908.000.000
5.2	BELANJA MODAL	101.086.081.862
5.2.01	Belanja Modal Tanah	19.738.181
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	19.738.181
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	19.738.181
5.2.01.01.01.0001	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	19.738.181
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.359.400.164
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	3.848.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	3.848.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	3.848.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	4.045.286.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.045.286.000
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.930.000.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	140.286.000
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	975.000.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	0
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	50.280.000
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	50.280.000
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	2.280.000
5.2.02.04.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	48.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.138.739.035
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	936.203.360
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	117.354.360
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	818.849.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.956.128.675
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	453.421.075
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	6.380.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	5.184.000
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	26.619.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	483.114.600
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	1.981.410.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	246.407.000
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	106.362.300
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	114.747.400
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	25.297.300
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	743.072.200
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	670.972.200
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	373.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	477.599.200
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	13.000.000

KABUPATEN GAYO LUES
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	180.000.000
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	72.100.000
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	50.000.000
5.2.02.06.02.0002	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB	22.100.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.758.485.400
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	3.258.485.400
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	315.000
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	82.472.000
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	3.175.698.400
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	500.000.000
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	500.000.000
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.101.228.259
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	530.500.000
5.2.02.08.01.0010	Belanja Modal Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	76.050.000
5.2.02.08.01.0048	Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi	279.550.000
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	174.900.000
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	570.728.259
5.2.02.08.03.0012	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:PKN	344.000
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	570.384.259
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.594.877.270
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.940.571.470
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	195.000.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.734.759.470
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	10.812.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.654.305.800
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	205.081.000
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	40.944.800
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.408.280.000
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	0
5.2.02.15.03.0004	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	0
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	150.000.000
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	150.000.000
5.2.02.16.01.0002	Belanja Modal Alat Peraga Percontohan	150.000.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	773.584.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	773.584.000
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	773.584.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.167.808.957
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	33.981.808.957
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	32.386.608.957
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.539.000.000
5.2.03.01.01.0004	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	3.542.902.773
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	965.047.500
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	9.177.540.194
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	473.202.500
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	7.584.597.740

KABUPATEN GAYO LUES
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	2.880.000.000
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.648.500.000
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	1.200.000.000
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	880.818.250
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	700.000.000
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	1.795.000.000
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.595.200.000
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	1.595.200.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	186.000.000
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	186.000.000
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	186.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	48.163.388.940
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	35.301.299.787
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	17.305.699.787
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	15.635.194.890
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	128.584.897
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	961.920.000
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	580.000.000
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	17.995.600.000
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	14.583.200.000
5.2.04.01.02.0010	Belanja Modal Jembatan Penyeberangan	3.412.400.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	4.535.202.153
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	4.360.702.153
5.2.04.02.01.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	1.324.702.153
5.2.04.02.01.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	3.036.000.000
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	174.500.000
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	174.500.000
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	1.302.500.000
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	1.302.500.000
5.2.04.03.10.0001	Belanja Modal Instalasi Lain	1.302.500.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	7.024.387.000
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	6.261.408.000
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	6.261.408.000
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	5.149.000
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	5.149.000
5.2.04.04.03	Belanja Modal Jaringan Telepon	757.830.000
5.2.04.04.03.0005	Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya	757.830.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	375.745.620
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	200.000.000
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	200.000.000
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	200.000.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	175.745.620
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	175.745.620
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	175.745.620
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	25.578.102.818
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25.578.102.818

KABUPATEN GAYO LUES
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	25.578.102.818
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	25.578.102.818
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	25.578.102.818
5.4	BELANJA TRANSFER	144.561.028.700
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	427.440.000
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	427.440.000
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	427.440.000
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	427.440.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	144.133.588.700
5.4.02.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	2.775.000.000
5.4.02.02.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota	2.775.000.000
5.4.02.02.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	2.775.000.000
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	141.358.588.700
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	136.689.088.913
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	136.689.088.913
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	4.669.499.787
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	4.669.499.787
	Jumlah Belanja	813.258.197.291
	Total Surplus/(Defisit)	2.000.000.000
6	PEMBIAYAAN	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.000.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.000.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000
	Pembiayaan Netto	(2.000.000.000)

Bupati Gayo Lues

 H. MUHAMMAD AMRU